

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kinerja Lurah dalam pelaksanaan bantuan beras miskin di kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru tahun 2013 (Dalam Perspektif Kepmenko Kesra No 57 Tahun 2012) sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap mekanisme penyaluran beras Miskin dapat dilihat bahwa sebanyak 21 responden Menyatakan Puas, yaitu sebanyak 30,8 %, sedangkan sebanyak 69,2% Menyatakan tidak Puas dengan mekanisme dan penyaluran beras Miskin, bahwa dalam menentukan Berhasil atau tidaknya seorang lurah dalam menjalankan tugasnya, dapat tercerminda ri penilaian Masyarakat terhadap kinerjanya, dalam hal ini adalah pelaksanaan penyaluran beras miskin yang mendapatkan penilaian dari masyarakat. Berdasarkan data dapat dipahami bahwa penilaian yang dilakukan oleh masyarakat bersifat subjektif, artinya tergantung, apakah dengan kinerja lurah tersebut masyarakat merasa diayomi oleh lurah atau tidak, bahwa kinerja dari Lurah dalam memberikan Atau menyalurkan beras miskin dapat dilihat dari penyaluran beras miskin itu telah merata disampaikan atau disalurkan kepada yang berhak menerimanya atau tidak, kemudian beras miskin tersebut telah ssesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah atau tidak, sehingga masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari penyaluran beras miskin benar-benar membantu rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan Beras Miskin di Kelurahan Simpang Baru Kota pekanbaru tahun 2013 adalah Tidak meratanya kapasitas pencacah yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai, Cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftarkan rumah tangga miskin, Prosedur penyaringan rumah tangga miskin (RTS) tidak dilakukan secara seksama, Pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah, Terdapat indikasi adanya penjatahan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat rukun tetangga (RT), Indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh, Konsep keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS) Raskin tidak ditetapkan secara tegas. Sehingga dapat dilihat bahwa Penyimpangan kualitas beras yang kadang bagus kadang jelek, Pembagian kartu Raskin mengandung unsur subyektifitas sehingga tidak tepat sasaran, Data RTS (Rumah Tangga Sasaran) dari BPS tidak valid dan tertutup, sehingga ada warga miskin tidak dapat kartu dan yang mampu dapat, sehingga menimbulkan ancaman, tuntutan dan kecemburuan sosial, Kebijakan ketua RW dan RT bahwa semua warga dapat beras (bagito) mengakibatkan pembagian Raskin tidak sesuai dengan aturan (15 kg/RTS), hal ini diakibatkan kurang sadarnya warga mampu yang seharusnya tidak dapat tetapi menuntut untuk mendapatkan bagiannya serta Pembayaran Raskin oleh RTS yang sering tertunda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah mengubah mekanisme pembayaran SOA Raskin menjadi pembayaran dimuka.
2. Untuk Lurah dan Bulog agar memperbaiki sistem manajemen persediaanya agar kualitas beras raskin yang didistribusikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Untuk Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin hendaknya mendistribusikan raskin kepada RTS-PM Raskin yang masuk dalam DPM.
4. Untuk Perangkat RT/RW agar melakukan pencacahan atau pemantauan terhadap masyarakat miskin, sehingga Beras yang disalurkan benar-benar untuk rumah tangga miskin.
5. Untuk Masyarakat, diharapkan mampu menilai dan mengawasi segala bentuk kebijakan agar kebijakan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik Oleh pemerintah Setempat.
6. Untuk Masyarakat agar memberikan Info kepada Pemerintah Setempat dengan Informasi yang sebenar-benarnya, sehingga pemerintah tidak dianggap salah dalam memberikan Bantuan beras miskin dan penyaluran beras miskin dapat terealisasi dengan baik.